

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

- Asikin, Zainal (ed), 1993, *Dasar-Dasar Huku Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Basani, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja*, Jakarta
- Budiono, Abdul Rachmad, 1995, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bungin, Burhan, 2006, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Damanik, Sehat, 2006, *Hukum Acara Perburuhan Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004*, Cetakan Ke II, DSS Publising, Jakarta
- G. Karta Sapoetra, Rience G. Widyaningsih, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung
- Hadi Setia Tunggal, 2004, *Asas-Asas Hukum Ketenagakerjaan Dilengkapi Keputusan Mahkamah Konstitusi Menyangkut Perburuhan*, Harvarindo
- Husni, Lalu, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- _____, 2005, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan diluar Pengadilan*, Cetakan ke II, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Khakim, Abdul, 2006, *Aspek Hukum Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan ke IV Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kosidin, Koko, 1999, *Perjanjian Kerja-Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, CV Mandar Maju, Bandung
- Maimun, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Cetakan I, Pradnya Paramita, Jakarta
- Moleong, J. Lexy. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mudzakir Iskandar, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Sugeng Seto
- Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja, Bandung
- Manulang, Sendjun H., 1995, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cetakan II, Rineka Cipta, Jakarta
- Prof. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan 4 Rev, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prints, Darwan, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Ke II, Ghalia Indonesia, Bogor
- Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka, 1879, *Penelitian Hukum*,

Bandung

Syahputra Tunggal, Iman dan Amin Widjaja Tunggal, 2003, *Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Baru di Indonesia*, Buku I, Harvarindo, Jakarta

Soepomo, Iman, 1975, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan

Suparman, Supomo, 2009, *Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan*, Jala Permata Aksara, Jakarta

Suma'mur, P.K, 1987, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Cetakan VI, CV. Haji Masagung, Jakarta

Ugo, Pujiyo, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan*, Sinar Grafika

Zaeni Asyhadi, Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum Amandemen)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Amandemen)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/ Serikat Buruh*

*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor
23 Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia*

*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri*

*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi
Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 120 Mengenai
Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja*

*Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan
Nasional*

*Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial*

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Nomor
138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja,
tanggal 7 Mei 1999*

*Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO
Convention (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan*

Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan
Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

*Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun
2003) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah

*Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pengawasan Ketenagakerjaan,
Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Direktorat
Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Jakarta 2007*

*Peraturan Perundang-Undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan, Jakarta 2009*

*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, tanpa
penerbit, Jakarta, 2013*

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan

*Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja*

*Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja,
Pekerja, dan Penerima Bantuan dalam Penyelenggaraan
Jaminan Sosial*

*Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan
Pekerjaan*

*Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan
Ketenagakerjaan*

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

*Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan
Kepesertaan Program Jaminan Sosial*

*Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan*

*Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Per.09/MEN/VI/2015 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan
Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan*

*Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.02/MEN/XI/2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi
Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan*

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/XI/2011 tentang Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Komite Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.04/MEN/VI/2011

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 102/ MEN/ VI/ 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur tanggal 25 Juni 2004

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi Tenaga Harian

Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tgl 6 Agustus 1999

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 4-18PWA.07.03/1983 tentang Kedudukan Pegawai Pengawas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 145.KP.01.12.2001 tentang Penanganan Masalah Ketenagakerjaan

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 06.KP.01.12.2001 tentang Pemanfaatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Perantara Hubungan Industrial

Surat Edaran Menteri dan Transmigrasi Nomor 396.KP.03.11.2001 tentang Kewajiban Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk berhubungan dengan Organisasi Pekerja di Perusahaan dalam setiap Melakukan Pemeriksaan

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.918/MEN/ PKK-Ses/XI/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.433/MEN/ PKK-Ses/VII/2005 tentang Peranan dan Tindakan Nyata Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.512/MEN/

PKK-Ses/III/2005 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan bagi Bank Indonesia

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.726/MEN/ PKK-Ses/X/2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Berbasis Teknologi

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Kab. Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Fungsi pembinaan dan pengawasan Dinsosnakertrans di bidang Ketenagakerjaan)

C. INTERNET

<http://news.detik.com/read/2015/02/28/155154/2845722/10/> kecelakaan-kerja-

<http://www.infonitas.com>,senin 10/02/2015

Juwita.blog.fisip.ac.id/2013/03/29/deskriptif-kualitatif,posted

Friday,march,29th,2013

Web <http://www.antarnews.com/berita/360749/jamsostek>

HSE UK 2013

<http://bbc.co.uk/> 1 Mei 2014

[Http://news.okezone.com/read/2013/05/01/337/800630/Muhaimin](http://news.okezone.com/read/2013/05/01/337/800630/Muhaimin) berharap-

pengusaha-dukung-may-day

[Http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/Selamat-Tinggal-](http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/Selamat-Tinggal-)

[Jamsostek-Selamat-Datang-BPJS-Ketenagakerjaan/47229](http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/Selamat-Tinggal-Jamsostek-Selamat-Datang-BPJS-Ketenagakerjaan/47229)

www.bpjs-kesehatan.go.id/statis-5-sejarah.html

[www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=2id=9\](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=2id=9)

<http://www.cendekiaconsultant.com/trainer/20/abdul-khakim-sh-mhum>

D. JURNAL

Modul Pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan, 2014, Bogor

Himpunan data object pengawas ketenagakerjaan Dinsosnakertrans

Kabupaten Rembang triwulan IV bulan Januari 2014

Kumpulan Laporan Data Inspeksi Perusahaan Bidang Hubungan Industrial

dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans Kabupaten

Rembang Tahun 2014-2015